ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

DIRGA TRI UTAMA HUTASOIT
NIM. B1011221207

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Dirga Tri Utama Hutasoit
NIM	:	B1011221207
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 Juni 2026

Dirga Tri Utama Hutasoit
NIM. B1011221207

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Dirga Tri Utama Hutasoit
NIM	:	B1011221207
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 24 Juni 2026

Dirga Tri Utama Hutasoit
NIM. B1011221207

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Dirga Tri Utama Hutasoit
B1011221207

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 22 Mei 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si	11 Juni 2026	
		NIP 196312091989031004		
2.	Ketua Penguji	Dr. Hendarmin, S.E., M.Si.	8 Juni 2026	
		NIP 197705092005011003		
3.	Anggota Penguji	Ninuk Dwiastuti Ruwandari, S.E., M.M.	10 Juni 2026	
		NIP 196312041990022001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 18 JUN 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	:	Dirga Tri Utama Hutasoit
NIM	:	B1011221207
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. H. Wahyudi, S.E.,M.Si NIP. 196312091989031004		

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**" Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura Pontianak dan merupakan wujud dari ilmu-ilmu yang diperoleh selama ini.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi Saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya
kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Nurul Bariyah, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. H. Wahyudi, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing utama, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Segala masukan dan ilmu yang Bapak bagikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak luangkan.
4. Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama, atas segala saran, koreksi, serta masukan kritis yang telah diberikan selama sidang tugas akhir. Arahan dan perhatian Bapak sangat membantu saya dalam memperbaiki berbagai kekurangan pada penulisan ini menjadi lebih baik dan terarah.
5. Ibu Ninuk Dwiastuti Ruwandari, S.E., M.A. selaku dosen penguji kedua, atas kejelian, kesabaran, serta masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan tugas akhir ini. Setiap catatan dan nasihat yang Ibu berikan menjadi pelajaran penting bagi saya untuk terus belajar dan berkembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi di kampus.
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis selama masa studi.
8. kepada kedua orang tua saya, Bapak Torang Hutasoit dan Ibu Ratna Sidabutar, atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materi, serta kesabaran yang tiada henti selama saya menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Serta mama yang selalu senantiasa menjadi tempat bercerita dan curhat terbaik mengenai semua yang terjadi dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Segala pengorbanan dan ketulusan yang Papa dan Mama berikan menjadi kekuatan terbesar bagi saya untuk dapat sampai di titik ini. Semoga ini menjadi kebanggaan dan awal dari kebahagiaan untuk keluarga.

9. kepada kakak saya, Listika Hutasoit, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan baik secara langsung berupa materi maupun tidak langsung. Kehadiran dan perhatian kakak sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. kepada keluarga besar 'BASECAMP' Amel, Deva, Panca, Irul, Nopal, dan Erna serta teman teman kampus yang lainnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih telah setia menemani dari awal semester, menjadi teman nugas bareng saat deadline menumpuk, teman ngopi di sela-sela lelah, serta teman santai untuk sekadar melepas penat. Sungguh berkat kebersamaan dan dukungan kalian, masa-masa sulit terasa lebih ringan dan masa indah terasa lebih berarti. Terima kasih juga untuk rumah Panca yang dengan terbuka dan hangat selalu menjadi tempat paling nyaman untuk kami berkumpul, berbagi cerita, bertukar pikiran. Hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini, bersama Kalian semua adalah alasan saya bisa tersenyum dan bertahan sampai di titik ini.
11. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada sahabat saya, Amelia Kanina. Ia adalah sosok yang selalu ada untuk saya, baik dalam suka maupun duka. Menjadi tempat saya mencurahkan isi hati, bercerita lepas, dan berbincang tanpa batasan. Tiada kata yang dapat menggambarkan cerita dan perjalanan perkuliahan kita bersama setiap tawa, tangis, perjuangan, dan kenangan yang kita lalui telah menjadi bagian dari kisah yang tak terlupakan**.** Ia juga salah satu penyemangat, pengingat, dan pendukung saya selama menempuh perkuliahan ini. Saya sungguh bersyukur memiliki sahabat terbaik seperti Amel di sisi saya.
12. Kepada Keluarge besar ‘Kawan Geraja’ Saya juga mengucapkan terima kasih kepada gee ku semua yang selalu mendoakan dan memberi semangat. Kebersamaan kita selama ini mengajarkan saya arti kasih persaudaraan yang tulus. Kalian adalah berkat yang tidak ternilai, dan saya bersyukur memiliki kalian di sisi saya selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Warkop Lao. Tempat sederhana ini telah menyaksikan coretan-coretan kasar, secangkir demi secangkir kopi, serta kebisingan yang justru menjadi latar belakang produktif bagi saya. Warkop Lao adalah bagian kecil namun berharga dari perjalanan panjang penulisan skripsi ini.
14. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman, kerabat, keluarga, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan perhatiannya selama proses penulisan skripsi ini. Maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu per satu—namun setiap kebaikan, sekecil apapun, telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan sungguh berarti bagi saya. Terima kasih untuk semuanya.
15. Terakhir, saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri terimakasih untuk selalu berjuang, terimakasih untuk tidak menyerah dan bertahan, bahkan di titik terendahpun masih percaya bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Saya percaya saya bisa karena Tuhan selalu menuntun dan menopang saya untuk melewati semua perjuangan ini, terimakasih Tuhan Yesus.

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Dirga Tri Utama Hutasoit

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya serta keuangan secara mandiri guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal.

Optimalisasi PAD dan pemanfaatan DAU yang efektif diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk (LPP) juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan peluang melalui peningkatan jumlah tenaga kerja dan pasar, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan pelayanan publik apabila tidak dikelola dengan baik.

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang beragam masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti ketimpangan antar daerah dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, sehingga peningkatannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih berkelanjutan. Di sisi lain, DAU sebagai bentuk transfer dari pemerintah pusat berperan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga penggunaannya yang efektif dapat mendukung aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, LPP mencerminkan dinamika demografi yang dapat memberikan dampak ganda terhadap perekonomian, di mana pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi melalui peningkatan jumlah tenaga kerja dan pasar, namun juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan kualitas

sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, interaksi antara ketiga variabel tersebut menjadi penting untuk dianalisis, baik secara parsial maupun simultan, guna memahami sejauh mana kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kondisi ini menimbulkan masalah penelitian terkait bagaimana kontribusi dan pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
b) Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
c) Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPP) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengolahan data numerik menggunakan metode statistik. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dengan unit analisis sebanyak 14 kabupaten/kota selama periode pengamatan tahun 2017–2024. Data yang digunakan berupa data panel, yaitu gabungan data runtun waktu dan data lintas wilayah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana data umum terkait kondisi ekonomi dan pembangunan daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) bersumber dari BPS, sedangkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta didukung oleh literatur yang relevan dengan topik penelitian.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata di daerah karena kontribusinya masih terbatas dan pengelolaannya belum optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi beban bagi perekonomian apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang memadai..

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan

pendapatan yang lebih efektif. Dana Alokasi Umum terbukti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pengaruh negatif namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak dimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah..

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan yang lebih efektif dan mengarahkan penggunaannya pada kegiatan yang bersifat produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan Dana Alokasi Umum secara lebih terencana dan transparan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv

1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 8
   2.1 Tinjauan Teori 8
      2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 8
      2.1.2 Ekonomi Publik 11
      2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 12
      2.1.4 Pendapatan Asli Daerah 13
      2.1.5 Dana Alokasi Umum 16
      2.1.6 Laju Pertumbuhan Penduduk 19
   2.2 Tinjauan Empiris 21
   2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 24
      2.3.1 Kerangka Konseptual 24
      2.3.2 Hipotesis Penelitian 25
3. METODE PENELITIAN 25
   3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 25
   3.2 Jenis dan Sumber Data 26
   3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 26
   3.4 Metode dan Alat Analisis 27
      3.4.1 Teknik Analisis Data 27
      3.4.2 Model Regresi Berganda 27
      3.4.3 Model Estimasi Regresi Data Panel 27
      3.4.4 Pemilihan Teknik Terbaik 27

3.5 Pengujian Model 28
3.6 Uji Statistika 28
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Hasil 29
4.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 29
4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda 29
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 31
4.1.4 Uji Statistik 33
4.2 Hasil dan Pembahasan 35
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Dearah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 35
4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 35
4.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 36
5. PENUTUP 36
5.1 Kesimpulan 36
5.2 Rekomendasi 37

DAFTAR PUSTAKA 39
LAMPIRAN 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024 3
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024 4
Tabel 1. 3 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024 6
Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024 7
Tabel 4. 1 Hasil Uji Model 29
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Berganda Dengan Model Random Effect 29
Tabel 4. 3 Nilai Efek Antar *Unit (Cross-Section Effect)* 30
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas 32
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas 32
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi 33
Tabel 4. 7 Uji F Statistik dan Keofisien Determinasi (R^2) 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Umum DAU..... 18
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual..... 25
Gambar 2. 3 Uji Normalitas..... 31

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dirga Tri Utama Hutasoit

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and population growth rate on economic growth at the district and city levels in West Kalimantan Province. Using a quantitative approach, this study applies panel data regression analysis through a Fixed Effect Model. The findings of the study indicate that partially, PAD has a positive but insignificant effect on economic growth, while DAU shows a positive and significant effect. Conversely, the population growth rate variable shows a negative but still significant effect. When tested simultaneously, these three fiscal variables together have a significant effect on economic growth. Thus, it can be concluded that the fiscal decentralization policy through DAU and population growth rate management is considered optimal in driving economic growth, while the contribution of PAD has not shown a significant effect in West Kalimantan Province.

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, population growth rate*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel melalui model Fixed Effect Model. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Sebaliknya, variabel laju pertumbuhan penduduk justru memperlihatkan pengaruh yang negatif namun tetap signifikan. Apabila diuji secara simultan, ketiga variabel fiskal tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal melalui DAU dan pengelolaan laju pertumbuhan penduduk dinilai sudah optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kontribusi PAD belum menunjukkan pengaruh yang signifikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Laju Pertumbuhan Penduduk

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses peningkatan produksi yang terjadi secara bertahap sepanjang periode waktu tertentu, yang berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kemajuan pembangunan suatu negara, sebagaimana dinyatakan oleh Todaro dalam Wihastuti, (2015). Pada konteks ini, kita dapat menyoroti tiga elemen kunci yang patut diperhatikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkelanjutan dan bukan sekadar cuplikan kondisi ekonomi di satu momen tertentu. Lebih rinci lagi, hal ini melibatkan sifat dinamis dari sebuah sistem ekonomi, di mana kondisi ekonomi terus berevolusi serta mengalami perubahan sepanjang waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi juga erat kaitannya dengan peningkatan produksi per orang, yang dipengaruhi oleh nilai keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta besarnya populasi suatu negara. Ketiga, dari perspektif jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam rentang waktu yang luas, seringkali mencapai puluhan tahun, dan biasanya terjadi ketika ada tren positif yang berasal dari mekanisme internal dalam sistem ekonomi tersebut sendiri.

Menurut Arbila dkk., (2022) pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai rangkaian perubahan berkelanjutan pada keadaan ekonomi sebuah negara, yang mengarah pada peningkatan kualitas secara bertahap dalam kurun waktu yang ditentukan. Salah satu tanda utama dan penting dalam studi ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang digunakan untuk mengukur secara keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di tingkat nasional.

Perkembangan ekonomi daerah adalah standar esensial untuk mengevaluasi keberhasilan kemajuan perekonomian Di suatu wilayah. pertumbuhan ekonomi tidak sekadar mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pemerintah dearah mampu untuk mengoptimalkan potensi, kekayaan sumber daya, serta modal yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran pemerintah daerah semakin strategis karena memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan Pembangunan daerah.

Seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pemerintah pusat memberikan mandat kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola berbagai urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari dasar otonomi daerah. Sesuai dengan regulasi terkait otonomi daerah, pengelolaan keuangan serta pemanfaatan sumber daya lokal sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Otonomi daerah seyogyanya mampu mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri guna mendanai berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pengurangan ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi prioritas, yang mengharuskan setiap wilayah untuk mengoptimalkan potensi internal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu aspek yang penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah adalah ketersediaan sumber pendanaan serta dinamika demografi, khususnya laju pertumbuhan penduduk (LPP). Pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). PAD merepresentasikan otonomi fiskal sebuah daerah, yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu, DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk mengurangi ketimpangan

antardaerah. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk (LPP) mencerminkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dapat memengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, ketersediaan tenaga kerja, serta beban pelayanan publik dalam perekonomian. Peningkatan PAD menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah yang lebih besar dalam mendanai pembangunan, sementara DAU membantu daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Namun, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi produktivitas ekonomi justru dapat menghambat manfaat dari PAD dan DAU tersebut.

Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai semua kegiatan pemerintahan, sehingga setiap otoritas daerah perlu lebih aktif mengurus pemanfaatan dana yang diperoleh, sebagaimana dijelaskan oleh Helly, (2019). Namun, tidak semua wilayah mempunyai kapasitas finansial yang sama untuk mendanai operasionalnya, yang berujung pada disparitas fiskal antar daerah. Selain itu, perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar wilayah juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan, karena daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, dan pelayanan publik.

Di tingkat implementasi, masih terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat belum menunjukkan jumlah yang besar. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, ketidakmerataan laju pertumbuhan penduduk antardaerah turut mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya serta mendorong kegiatan ekonomi. Apabila pertumbuhan jumlah penduduk berlangsung pesat namun tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, memiliki karakteristik wilayah dan potensi yang beragam. Dengan kabupaten/kota yang tersebar hingga kawasan perbatasan dan pesisir, provinsi ini menghadapi tantangan pembangunan seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan antarwilayah, dan kapasitas fiskal yang belum optimal. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber pendanaan utama. PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sedangkan DAU berperan sebagai instrumen pemerataan dari pusat. Selain kedua faktor fiskal tersebut, dinamika Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) turut memengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperluas pasar tenaga kerja, namun juga berpotensi menekan infrastruktur dan layanan publik jika tidak diimbangi peningkatan kapasitas produksi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti seberapa besar pengaruh PAD, DAU, dan LPP terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto/PDB) secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menunjukan perkembangan yang positif dengan dukungan dari berbagai sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih berperan sebagai fondasi utama dalam ekonomi, memberikan kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor industri pengolahan juga memainkan

peran penting, terutama dalam mengolah hasil-hasil tambang dan hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah.

Perdagangan besar dan eceran turut menggerakkan aktivitas ekonomi dengan peran yang signifikan dalam distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Konsumsi rumah tangga juga menjadi motor utama penggerak ekonomi, mencerminkan tingkat aktivitas dan permintaan domestik yang terus meningkat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di daerah ini didukung oleh kombinasi sektor primer, sekunder, dan tersier dengan berbagai usaha dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kemampuang bersaing, sehingga menciptakan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di semua wilayah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat

Tabel 1. 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Persen)							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,37	4,63	4,68	4,74
Bengkayang	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45	4,68	4,75
Landak	5,17	4,92	4,88	-0,71	4,88	4,64	4,39	4,54
Mempawah	5,87	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70	5,09	6,62
Sanggau	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61	2,04	4,14
Ketapang	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,42	1,10	4,89
Sintang	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,97	4,68	4,89
Kapuas Hulu	5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43	4,53	4,61	4,75
Sekadau	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10	4,69	4,86
Melawi	4,70	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90	4,56	4,76
Kayong Utara	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,60	5,03	4,48	4,52
Kubu Raya	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,43	4,98	4,99
Kota Pontianak	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,61	4,97	4,76	5,03
Kota Singkawang	5,38	4,64	4,41	-2,51	4,82	4,97	5,06	5,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2025)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2017–2024 memperlihatkan dinamika yang fluktuatif di setiap kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh, pemerintah berusaha memperkokoh kapasitas fiskal daerah melalui pengembangan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini mencakup peningkatan dari sumber yang sudah ada serta eksplorasi sumber daya baru, dengan tetap mematuhi peraturan yang ada dan mempertimbangkan kondisi serta potensi ekonomi lokal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum Berbagai sumber penerimaan daerah mencakup hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari badan usaha milik daerah, pengelolaan aset daerah, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Saptaningsih, dalam Nisa (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua pemasukan yang berasal dari potensi ekonomi internal wilayah tersebut, dengan pengukurannya mengacu pada target tahunan yang ditetapkan untuk kabupaten atau kota dalam setiap periode anggaran. Sumber ini harus terus didorong pertumbuhannya sebagai bagian penting dari pendapatan daerah. Fungsi utama PAD adalah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi secara efektif, sesuai dengan ciri khas daerah tersebut sebagai bentuk nyata dari prinsip desentralisasi. PAD juga berfungsi sebagai indikator krusial dalam mengukur level kemandirian finansial suatu entitas daerah.

Semakin signifikan kontribusi PAD sehubungan dengan total pendapatan, semakin besar pula tingkat otonomi fiskal daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, regulasi ini mencakup berbagai dimensi keuangan, seperti perencanaan, penganggaran, implementasi, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya untuk Belanja Modal yang mempertimbangkan prinsip keadilan, kebutuhan, serta potensi daerah. Otoritas pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berfungsi menjadi badan legislatif, dalam rangka menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlebih dahulu. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk alokasi sumber daya anggaran. KUA dan PPAS merupakan hasil dari pengumpulan aspirasi publik, sehingga memberikan kejelasan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	200.32	127.66	148.85	129.68	148.14	167.64	192.63	229.12
Bengkayang	45.59	50.53	51.96	54.41	62.81	76.61	79.22	84,08
Landak	124.37	78.98	92.87	104.64	97.87	73.28	58.91	89.45
Mempawah	71.80	75.77	87.58	98.62	96.15	154.47	141.54	147.45
Sanggau	151.92	117.50	117.49	117.92	129.73	147.33	146.34	176.13
Ketapang	168.04	190.36	195.24	231.28	291.00	225.48	278.35	260,64
Sintang	113.17	240.58	172.28	134.83	176.52	162.32	161.01	179.04
Kapuas Hulu	131.22	76.00	79.98	79.17	78.66	70.67	69.34	92.32
Sekadau	72.78	59.09	45.36	46.98	45.14	49.96	56.83	58.80
Melawi	67.20	40.84	40.58	30.87	56.17	43.67	34.87	54,59
Kayong Utara	36.49	27.21	28.60	39.53	34.41	39.75	46.67	45.32
Kubu Raya	152.02	184.53	172.84	151.01	160.89	165.15	162.21	253,23
Kota Pontianak	476.05	440.36	478,79	403,18	413,4	537,8	540,57	593,78
Kota Singkawang	132.10	130.86	166.20	154.27	175.46	213.79	232.83	272.08

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan antar daerah maupun antar tahun.

Menurut Citra & Kurnia (2024) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari penyaluran keuangan kepada daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom. Pendanaan ini disalurkan dengan maksud meminimalisir perbedaan dalam kapasitas finansial dan penyediaan layanan publik antar daerah. DAU berfungsi untuk mendanai keperluan pengeluaran dalam rangka implementasi desentralisasi. Sebagai bagian krusial dari dana perimbangan, pemanfaatan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing. Sasaran pokok DAU adalah meningkatkan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik sebagai manifestasi dari implementasi otonomi daerah, di mana bagi mayoritas pemerintah daerah, DAU berfungsi sebagai sumber utama pendapatan terbesar dan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal.

Jumlah transfer DAU dihitung berdasarkan berbagai variabel, termasuk jumlah populasi, luas area geografis, serta indeks pembangunan manusia, kapasitas fiskal, serta kebutuhan fiskal yang sebagian besar berkaitan dengan belanja pegawai negeri sipil. Melalui mekanisme tersebut, DAU diharapkan mampu menurunkan kesenjangan fiskal antarwilayah serta mendorong pemerataan pembangunan.

Dana Alokasi Umum (DAU) didistribusikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Besaran minimal alokasi DAU ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembagian proporsi DAU antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan keseimbangan kewenangan di antara keduanya. DAU berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar daerah, di mana penggunaannya bersifat block grant sehingga sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Prinsip utama dalam penetapan DAU pada dasarnya adalah implementasi dari teori transfer pusat ke daerah, yang berakar pada konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap). Menggunakan pendekatan ini, kesenjangan fiskal, yang direpresentasikan sebagai perbedaan negatif antara kebutuhan dan kemampuan fiskal, dinilai dengan defisit dimana memerlukan pembiayaan lewat dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1. 3 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024

Kota	Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	871.25	873.61	896.48	813.95	803.74	804.34	884.77	1.011.17
Bengkayang	578.24	581.27	601.38	547.39	543.07	543.57	578.33	630.82
Landak	669.29	670.22	684.64	611.31	608.48	608.63	655.53	720.64
Mempawah	580.51	583.21	600.580	539.55	531.64	531.67	556.89	588,9
Sanggau	824.22	824.22	844.41	747.18	740.41	741.78	790.87	864.00
Ketapang	1.122.27	1.122.27	1.149.71	1.040.65	1.032.25	1.034.13	1.091.07	1.161.36
Sintang	909.41	909.41	934.21	843.50	837.19	838.16	891.50	967.17
Kapuas Hulu	975.76	975.76	997.68	900.43	891.10	893.02	924.28	988.01
Sekadau	503.19	504.55	515.57	467.31	463.85	464.25	485.42	520.67
Melawi	604.54	604.54	617.83	557.38	553.17	554.28	573.68	593.08
Kayong Utara	464.06	472.54	489.56	447.78	444.91	445.77	464.00	473.19
Kubu Raya	779.06	782.65	811.51	726.71	718.35	719.09	788.99	896.88
Kota Pontianak	699.45	699.45	728.44	658.27	646.76	646.76	710.59	808.81
Kota Singkawang	492.49	492.49	518.96	465.33	457.02	457.02	478.16	504.59

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025)

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi pada beberapa tahun, terutama saat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi pada sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu untuk pengukuran. Menurut Suryani & Putri, (2020) Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah yang terjadi setiap tahun, baik berupa peningkatan maupun penurunan. Angka ini digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Di negara-negara yang sedang berkembang, laju pertumbuhan penduduk termasuk dalam persoalan yang sulit ditangani. Menurut pandangan Malthus, pada kondisi awal, peningkatan jumlah penduduk tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi, justru dapat menimbulkan efek sebaliknya, yakni menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, bagi sebagian pihak, bertambahnya jumlah penduduk yang signifikan dipandang sebagai hal yang menguntungkan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi subjek dalam proses pembangunan dan perekonomian, terutama apabila didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Tetapi disisilain faktanya dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak justru akan berdampak pula pada angka kriminalitas. Hal ini disebab kan karena perekonomian suatu negara tidak bisa mengimbangi angka penduduk yang semakin banyak. Yang dimana banyak sekali orang-orang yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan dana khirnya melakukan tindakan kriminalitas demi mendapatkan uang pertumbuhan ekonomi namun ketika masuk kedalam keadaan optimum.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam melihat dinamika demografi suatu wilayah yang mencerminkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan lapangan kerja, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran.

Dengan demikian, pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara optimal agar mampu menunjang terwujudnya proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, untuk memahami kondisi dan perkembangan laju pertumbuhan penduduk di provinsi Kalimantan Barat secara lebih jelas, maka diperlukan penyajian data yang menggambarkan perubahan jumlah penduduk pada wilayah penelitian dalam periode tertentu.

Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024

Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (Persen)							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	0,89	0,89	0,82	2,34	1,68	1,62	1,2	1,04
Bengkayang	1,93	1,93	1,87	2,8	2,14	2,08	1,56	1,49
Landak	1,53	1,53	1,48	1,83	1,17	1,11	1,41	1,33
Mempawah	1,37	1,37	1,32	2,48	1,82	1,76	1,32	1,26
Sanggau	1,58	1,58	1,54	1,67	1,02	0,96	1,39	1,28
Ketapang	2,06	2,06	2	2,84	2,17	2,11	1,35	1,24
Sintang	1,56	1,56	1,51	1,4	0,75	0,69	1,4	1,29
Kapuas Hulu	1,92	1,92	1,86	1,25	0,6	0,54	1,37	1,28
Sekadau	1,17	1,17	1,13	1,49	0,83	0,77	1,37	1,27
Melawi	1,74	1,74	1,68	2,4	1,74	1,68	1,69	1,56
Kayong Utara	1,84	1,84	1,8	2,75	2,09	2,03	1,77	1,68
Kubu Raya	1,62	1,62	1,59	1,91	1,26	1,2	1,74	1,66
Kota Pontianak	1,71	1,71	1,68	1,68	1,02	0,96	0,87	0,8
Kota Singkawang	2,02	2,02	1,96	2,27	1,61	1,55	1,67	1,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2025)

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan antar daerah maupun antar tahun.

Provinsi Kalimantan Barat mencakup 14 pemerintahan daerah, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota Pontianak serta Singkawang. Seluruh daerah ini terlibat aktif dalam desentralisasi fiskal, yang memberikan otoritas kepada masing-masing wilayah untuk mengatur dan memajukan kapasitas ekonominya secara mandiri. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur. Kebijakan publik oleh pemerintah daerah dapat menentukan efisiensi penggunaan APBD,

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain kedua variabel fiskal tersebut, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) juga turut berpengaruh. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperluas pasar tenaga kerja, namun tidak diimbangi dengan infrastruktur dan kualitas SDM yang memadai, justru dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti seberapa besar pengaruh PAD, DAU, dan LPP terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang belum seragam. Beberapa studi menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan kemandirian fiskal, namun studi lain menyatakan sebaliknya karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil. Hasil yang tidak konsisten juga ditemukan pada variabel DAU, di mana sebagian penelitian menunjukkan DAU mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan karena dana tersebut cenderung digunakan untuk belanja rutin. Demikian pula dengan laju pertumbuhan penduduk, ada yang berpendapat dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan permintaan pasar, namun penelitian lain mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi justru menjadi penghambat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM dan lapangan kerja yang memadai.

Adanya perbedaan hasil tersebut menandakan masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu ditelaah lebih mendalam dalam konteks wilayah dan periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup 14 kabupaten/kota, serta menggunakan periode tahun penelitian dari 2017 hingga 2024. Pemilihan wilayah dan periode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru yang lebih spesifik dan relevan dengan karakteristik lokal Kalimantan Barat.